KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Indonesia-Australia: Menhan yang Berhak Hentikan Kerjasama
Tanggal : Senin, 09 Januari 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : A3

INDONESIA-AUSTRALIA

Menhan yang Berhak Hentikan Kerjasama

JAKARTA-Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta mengatakan secara administrasi soal melakukan atau menghentikan kerjasama itu adalah Menteri Pertahanan. Hal ini menanggapi kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menangguhkan kerjasama dengan militer Australia. "Ya itu kalau kerjasama kan memang secara administrasi Menhan, tetapi yang punya personilkan TNI. Tidak masalah (secara hukum)," kata Sukamta, di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1).

Namun, Anggota Komisi I DPR RI itu mengaku, hal itu jangan dipertentangkan karena keduanya merupakan institusi yang mengurusi Tentara Nasional Indonesia. Menurut dia, Panglima TNI pasti sudah koordinasi terkait penangguhan kerjasama. "Saya kira mereka sudah berkoordinasi, panglima tidak mungkin membuat langkah yang gegabah. Cuma kalau mau melakukan itu tidak perlu lapor dulu ke masyarakat, itu urusan internal mereka," ujarnya.

Kemudian, Sukamta meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memaafkan ulah Australia, karena melalui Menteri Pertahanan Australia Marise Payne sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menginvestigasi adanya oknum yang diduga melecehkan Pancasila dan TNI. "Saya kira sudah ada permintaan maaf dari pejabat resmi di Australia itu cukup," jelas dia.

Oleh karena itu, Sukamta mengatakan, pihaknya sebagai mitra kerja TNI dan Menteri Pertahanan akan memanggil keduanya untuk menjelaskan secara detail apa yang terjadi sebenarnya dengan Australia. "Salah satu agenda yang perlu diprioritaskan di awal masa sidang, kita akan memanggil Panglima TNI dan meminta keterangan persoalan ini supaya jelas duduk persoalannya dan keterangan yang utuh," tandasnya. (aen)